

GOVERNMENT (Hal.2)
Giliran Bobby Nasution
Naik Jet Pribadi
Ketua KPK Minta
Direktur LHKPN
Klarifikasi

Tiba di Indonesia, Paus Fransiskus Bawa Pesan Kedekatan dan Perdamaian

Paus Fransiskus tiba di Indonesia, Selasa (3/9)2024), dalam rangka Perjalanan Apostolik ke kawasan Asia Tenggara. Indonesia jadi negara yang pertama dikunjungi dalam Perjalanan Apostolik ke-45 Paus Fransiskus. Dia akan melakukan sederet kegiatan di Indonesia sampai tanggal 5 September 2024, dan akan bertolak melanjutkan Perjalanan Apostolik ke Papua Nugini pada 6 September 2024. Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan, tetapi juga memiliki makna spiritual mendalam bagi umat Katolik di Indonesia. Ini menjadi momen bersejarah karena kunjungan Paus ke Indonesia terakhir oleh Paus Yohannes Paulus II pada Oktober 1989. Selamat datang. (bbc,ist)

Pemindahan ASN ke IKN Maju Mundur, Mundur Lagi

April 2024 lalu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemindahan aparat sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) akan dilakukan secara bertahap. Pada Juli 2024 bakal ada sejumlah menteri dan jajaran yang mulai pindah ke ibu kota baru. Kemudian bulan September 2024, setelah rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, akan dilakukan pemindahan ASN secara lebih masif. Berdasarkan hasil penapisan yang telah dilakukan terhadap kementerian/lembaga (K/L), prioritas pertama pemindahan adalah 179 unit eselon I dari 38 K/L, prioritas kedua 91 unit eselon I dari 29 K/L, dan prioritas ketiga 378 unit eselon I dari 59 K/L. Namun rencana tinggal lah wacana, karena hingga kini target yang maju mundur tersebut, mundur lagi. Terkini Jokowi disebut tak mau buru-buru. ASN bakal ke Kalimantan Timur setelah pembangunan infrastruktur digital selesai. Tak hanya itu, pembangunan hunian, perkantoran dan bandara juga belum tuntas. Melihat masih banyaknya PR pembangunan, dana yang dibutuhkan tentu saja tak sedikit. Namun faktanya, Kementerian PUPR mencatat alokasi anggaran untuk IKN Nusantara pada 2025 hanya sebesar Rp4 triliun.

Baca Hal 11....

ASN YANG DIPINDAHKAN KE IKN



Rencana awal ASN pindah periode juli-november 2024
3.246



Jumlah kementerian/ lembaga
37



Hunian disisipkan (unit)
1.740

**TOTAL
100.023**

Jabatan

Jabatan Fungsional
95.803

Jabatan Pimpinan Tinggi
3.264

Jabatan Pimpinan Tinggi
956

Jenis Kelamin

Laki-laki
54%

Perempuan
46%

Usia

20-29
13.32%

30-39
35,54%

40-49
28.21%

50-60
19.83%

> 60
3.50%

Tingkat Pendidikan

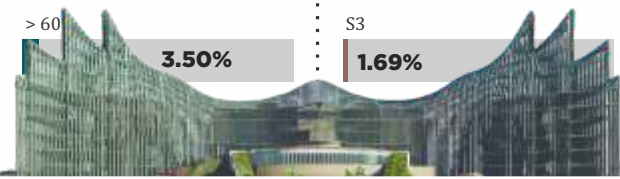
DIII
14.82%

DIV
5.39%

S1
51,39%

S2
26.72%

S3
1.69%



Giliran Bobby Nasution Naik Jet Pribadi

Ketua KPK Minta Direktur LHKPN Klarifikasi

JAKARTA- Belum reda gaduh Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi, kini giliran kakak iparnya, Bobby Nasution menjadi sorotan.

KPK bakal menelusuri ihwal Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang diduga juga menumpang private jet untuk bepergian.

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengaku telah memerintahkan Direktur LHKPN KPK untuk mengklarifikasi kegiatan menantu Presiden Jokowi itu.

"Saya baru meminta direktur LHKPN untuk mengklarifikasi apa yang berlangsung," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Foto Bobby menggunakan private jet itu ramai di media sosial pada akhir Agustus lalu. Bobby menanggapi isu ini dengan santai.

"Ya semuanya naik pesawat," kata Bobby menjawab pertanyaan kebenarannya menaiki private jet di Kantor DPRD Medan, Selasa (3/9/2024).

Meski begitu, Bobby mengaku santai soal sorotan itu. Ia menyatakan dana yang ia gunakan adalah dana pribadi.

"Ya coba lihat tanggal berapa, jam berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa? Kalau pun itu bukan punya sendiri, kalau itu sewa, uangnya dari mana silakan dicek," kata dia.

"Saya selalu sampaikan hal seperti itu silakan dicek, silakan dikroscek, apakah ada uang APBD, uang korupsi. Yang pasti saya bisa sampaikan bisa diklaim bukan dari itu," ujar Bobby.

Isu private jet ini ramai dibahas sebelumnya lantaran menyoroti postingan Erina Gudono, istri dari ipar Bobby, Kaesang Pangarep, soal jendela yang diduga private jet. Harganya sewa private jet ini disebut cukup fantastis. Namun, Kaesang belum berkomentar soal jet tersebut.

Heboh Kaesang 'Menghilang'

Terbaru warganet ramai menyebut Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep 'menghilang' setelah polemik jet pribadi mencuat.

Isu itu merujuk karena masih bungkamnya Kaesang terkait isu penggunaan jet pribadi. Akun media sosial Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, juga terakhir kali membuat unggahan pada 17 Agustus silam.

Warganet lalu banyak yang mengaitkan 'menghilangnya' Kaesang itu ke KPK. Lantas, apa kata KPK?

"Untuk mengetahui keberadaan seseorang itu tentunya secara undang-



Bobby Nasution dan keluarga naik jet pribadi (X @MurtadhaOne1)

undang apabila kita mau tahu posisi segala macam kan harus ada dasar ya. Menggunakan alat-alat teknologi itu harus ada dasar. Dalam hal ini mungkin surat perintah penyelidikan atau penyidikan dan sampai dengan saat ini belum ada," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

KPK saat ini juga telah menerima laporan dugaan korupsi yang dilakukan Kaesang terkait penggunaan fasilitas jet pribadi tersebut. Tessa menyebut laporan itu masih dalam penelaahan.

"Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya," katanya.

Selain laporan dugaan korupsi, KPK lewat Direktorat Gratifikasi berencana mengirimkan surat undangan kepada Kaesang. Undangan kepada Kaesang itu untuk mengklarifikasi fasilitas jet yang dipakainya bersama sang istri.

Tessa mengatakan di tengah isu Kaesang 'menghilang' tersebut, KPK dipastikan tidak akan menemui kesulitan dalam mengirimkan surat undangan kepada Kaesang. KPK, kata Tessa, akan menggunakan data Dukcapil milik Kaesang.

"Jadi kalau yang ditanyakan posisi yang bersangkutan untuk mengirim surat undangan, tadi saya sudah jawab bahwa kita juga bisa menggunakan dukcapil, melalui data kartu tanda penduduk untuk mengirimkan surat," katanya.

"Jadi saya pikir itu sudah lebih dari cukup lah kalau memang surat tersebut nanti akan dikirimkan," sambung Tessa.

Saat ditanya ihwal keberadaan Kaesang, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan bukan kapasitasnya menjawab keberadaan Kaesang atau perihal panggilan KPK.

"Mohon maaf saya tidak bisa menjawab atas nama Mas Kaesang karena bukan porsi saya," kata Grace Selasa (3/9/2024).

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni membeberkan Kaesang tiba di Jakarta 28 Agustus 2024 oagi hari. Siang harinya, Kaesang langsung berada di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Mas Kaesang memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada dan menandatangani berkas-berkas rekomendasi," kata Raja Juli, Selasa (3/9/2024)

Ia mengatakan Kaesang juga tak pergi ke mana-mana. Kaesang hampir setiap hari ngantor di DPP PSI. Juli mengaku selalu bertemu dengan Kaesang untuk berdiskusi tentang persiapan Pilkada 2024 setelah jam kantor

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan lembaganya akan mengirim surat kepada putra Presiden Joko Widodo tersebut. Namun, KPK tidak mengetahui posisi anak Presiden Joko Widodo itu.

"Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terserah nanti, apakah akan, saya enggak tau posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024). "Iya lah (Kaesang yang datang ke KPK), masa kita harus datang ke sana ngapain."

Alexander mengatakan mekanisme pemanggilan Kaesang ini merupakan prosedur yang memang berlaku di KPK. Sebelum mengundang, kata Alex, biasanya pihak-pihak yang akan diklarifikasi telah mendeklarasikan atau menjelaskan berita yang ramai di masyarakat.

"Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang dilakukan KPK? Tentu sesuai kebutuhan dari Kedepuitan Pencegahan dan Direktorat Gratifikasi," tuturnya.

Kaesang dipersilakan untuk mendeklarasikan penyewaan jet pribadi itu sebelum dipanggil untuk klarifikasi. Dia juga diharapkan membawa bukti jika memang hal tersebut tidak berkaitan dengan jabatan keluarganya.

IM57+ Institute ikut menanggapi soal dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono.

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan, MoU atau perjanjian kerja sama antara pemkot Solo dan pihak Shopee menjadi penting, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Boyamin Saiman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (sum,tro,ist,wid/dya)

HARTA BOBBY NASUTION

TOTAL

Rp 57,5 miliar

LHKPN 21 Maret 2024 periodik 2023



Tanah & bangunan

Rp 13 miliar



Kendaraan senilai

Rp 1,36 miliar



Surat berharga senilai

Rp 10,5 miliar



Kas dan setara kas senilai

Rp 6,8 miliar



UTANG

Rp 1,5 miliar



Menag Sebut Mukhtamar Ulang Sah PKB: Urus Pansus Haji saja!

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024. Pernyataan ini muncul usai Gusa Yaqut mengatakan sah bila ada mukhtamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, Selasa (3/9/2024).

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai mukhtamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Mukhtamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Mukhtamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8/2024) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Mukhtamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma'ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Mukhtamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Mukhtamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

Sebelumnya, Menag menilai sah saja jika ada mukhtamar ulang PKB di Jakarta meskipun sebelumnya telah dilaksanakan Mukhtamar PKB di Bali.

"Saya tidak menggagas soal itu. Akan tetapi, saya kira soal mau ada mukhtamar lagi, boleh-boleh saja," kata Yaqut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Begitu pun, banyak pula yang tak sepakat dengan hasil Mukhtamar PKB di Bali. "Ya banyak mereka kehilangan hak demokrasi seperti misalnya, keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi, tiba-tiba diputuskan," sebutnya. Di sisi lain, Yaqut mengklaim saat ini dirinya masih berstatus sebagai kader PKB.

Ia merasa tak pernah mendapatkan surat pemecatan dari DPP PKB. Namun, Yaqut mengklaim tak menjadi inisiator dari gerakan mukhtamar



Kepala Satkornas Banser Gus Syaifiq Syauiq (pegang mic) saat konferensi pers di Hotel Mercure, Jakarta Selatan pada Senin (2/9/2024).ist

tandingan. "(Mukhtamar tandingan) itu boleh dalam mekanisme politik ya. Boleh saja, tapi ya saya enggak tahu. Kalau saya sih enggak menginisiasi setidaknya," imbuh dia.

Banser soal Pernyataan Siap Perang

Sementara itu, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa NU menantang Tommy Kurniawan selaku Ketua Umum DKN Garda Bangsa untuk mengklarifikasi pernyataan perang yang diucapkan Tommy. Banser dan Pagar Nusa pun akan mendatangi pria yang akrab disapa Tomkur untuk bertabayun.

Kepala Satkornas Banser, Syaifiq Syauiq, menerangkan jika pernyataan Tommy Kurniawan hanya untuk menggertak, dia memastikan Banser tidak tergoyahkan sedikitpun dengan pernyataan itu.

"Kami kemarin mendapatkan info ajakan perang itu. Tapi kami tidak mau gegabah, tidak ingin terpancing. Kami, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Tommy. Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana," kata Syaifiq dalam konferensi pers di Hotel Mercure Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, gertakan perang tersebut timbul dari konflik yang saat ini membuat goyang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia pun menekankan bahwa Badan Otonom (Banom) NU tidak termasuk ke dalam konflik tersebut.

"Ansor ini Ormas, tidak terlibat politik praktis. Kalau ngajak perang karena konflik internal partai malah aneh. Lebih baik Garda Bangsa bantu selesaikan masalah internal PKB, koreksi diri," ucap dia.

Menurut Syaifiq, perintah yang diberikan oleh PBNU adalah untuk menyuarakan hak dan wewenang kepemimpinan ulama, bukan kekuasaan. Bagi dia, apapun bentuk penentangan terhadap aspirasi ini

semata-mata demi hak dan wewenang ulama.

"Kami akan melapor kepada PBNU dan meminta perintah selanjutnya apa yang harus kami lakukan. Apapun keadaannya. Kami minta semua kader dan anggota Ansor untuk tetap memegang teguh disiplin dan bertindak menurut komando pimpinan," ujar dia.

Komandan Pasukan Inti Nasional Pagar Nusa, Malik, menambahkan bahwa kalau memang dalam proses tabayun benar Garda Bangsa mengajak perang Banom NU, pihaknya siap menerima tantangan perang tersebut. Komando pun akan diberikan kepada seluruh kader.

"Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja. Misalnya kita siapkan panggung Pencak Dor. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana," ungkap Malik.

Sebelumnya, Tommy Kurniawan mengatakan siap jika harus melawan badan otonom Nahdlatul Ulama, GP Ansor, demi menjaga PKB. Hal itu pun diakui dia sudah disiapkan pada saat penyelenggaraan Mukhtamar PBNU di Bali.

"Jadi ya kami sebetulnya gini, risih juga kita harus menghadapi dengan keluarga sendiri. Tapi kami kalau memang itu diperlukan dan memang itu harus dilakukan, kami siap untuk menjaga partai ini dengan cara apapun. Kalau memang harus perang, kami siap perang," tutur dia, Sabtu (31/8/2024)

Terpisah, Wakil Presiden RI (Wapres) KH. Maruf Amin mengatakan, sedianya saling bersaing di setiap suatu organisasi jelang digelarnya penetapan pengurus dan pimpinan di periode yang baru sebuah hal yang lumrah.

Persaingan itu juga kata Wapres turut terjadi di organisasi kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Kendati demikian kata Wapres, sejatinya persaingan menjelang pergantian pengurus memang tak bisa dielakkan, namun, jika memang sudah terpilih dalam forum tertinggi harusnya dihormati. (tro,rls,ant/dya)

PANSUS HAJI VS PANSUS PKB

 **18 Juni 2024**

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR saat sidak ke Makkah Arab Saudi menemukan sejumlah permasalahan terkait penyelenggaraan haji 2024.



"Kesimpulan saya harus ada revolusi penyelenggaraan haji, dinitiatkan dari awal, perbaikan total."

Muhaimin Iskandar,
Ketua Timwas Haji DPR

 **18 Juni 2024**

Ketua Umum PBNU Gus Yahya mempertanyakan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 yang dinilai tidak memiliki alasan kuat. Cak Imin dianggap sedang mengincar dirinya melalui adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.



Makanya itu kami juga, gara-gara marah kepada PBNU, terus adik saya diincar apa bagaimana kan begitu sih. Kita enggak tahu, kita lihat saja nanti bagaimana ya."

Yaqut Cholil Staquf,
Ketua Umum PBNU

 **9 Juli 2024**

Rapat Paripurna DPR sepakat pembentukan Pansus Angket Haji 2024. Pansus tersebut akan mengevaluasi kesalahan-kesalahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

 **23 Juli 2024**

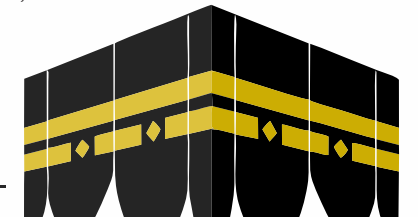
Dalam Mukernas PKB, Cak Imin sempat menyinggung Kementerian Agama yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024. Menteri Agama Yaqut merupakan adik Ketua Umum PBNU Yaqut Cholil Staquf alias Gus Yahya.

 **26 Juli 2024**

Sejken PBNU Saifullah Yusuf mewacanakan pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam pansus untuk mengembalikan PKB ke NU.

 **30 Juli 2024**

Ketua PBNU Umarsyah memastikan bahwa pihaknya telah membentuk pansus yang mengurus hubungan antara lembaganya dan PKB, dan mulai bekerja pada 31 Juli 2024.



PTUN DKI Tolak Gugatan Ghufron, Putusan Etik Dibacakan 6 September



Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Mei lalu.ist

JAKARTA- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Atas putusan tersebut, Dewas KPK bakal membacakan putusan mengenai dugaan pelanggaran kode etik Ghufron pada Jumat, 6 September 2023.

"Dalam penundaan: Mencabut

Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/G/TF/2024/PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Etik atas nama terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024," demikian dilansir dari laman Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Majelis hakim PTUN Jakarta menerima eksepsi Dewas KPK tentang kompetensi absolut pengadilan.

Putusan perkara nomor: 142/G/TF/2024/PTUN.JKT diputus pada hari ini, Selasa (3/9). Perkara ini diadili oleh ketua majelis hakim Irvan Mawardi dengan anggota Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan. Panitera pengganti Risma Hutajulu.

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima," ucap hakim.

"Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp442.000," sambungnya.

Merespons putusan tersebut, Dewas KPK akan membacakan putusan etik Ghufron pada Jumat, 6 September 2024.

"Rencana Jumat akan diputus," ucap anggota Dewas KPK Albertina Ho.

Beberapa bulan lalu, dalam putusan selanya, majelis hakim PTUN Jakarta meminta Dewas KPK menunda pemeriksaan etik terhadap Nurul Ghufron. Putusan sela itu keluar bersamaan dengan proses

penjaringan calon pimpinan KPK periode 2024-2029.

Ghufron termasuk ke dalam 40 orang calon pimpinan KPK yang hingga kini masih bertahan. Beberapa waktu lalu, mereka menjalani tes penilaian profil atau profile assessment.

Pihak KPK menghormati putusan yang dikeluarkan PTUN. "KPK menghormati putusan tersebut," kata jubiir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Tessa mengatakan sidang etik merupakan wewenang Dewas KPK. "Informasi terakhir yang kami terima, Dewan Pengawas akan melakukan sidang kembali di hari Jumat pukul 2 siang. Untuk itu, nanti kita tunggu saja sama-sama apa hasil dari putusan Dewan Pengawas tersebut," jelas Tessa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron pasrah menghadapi vonis Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Vonis terkait kasus dugaan ikut campur tangan Ghufron dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan). (tro,rls,ant/dya)

Pembinaan Rehabilitasi Terumbu Karang di Desa Widoro Pacitan



PACITAN - Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar melalui Seksi Konservasi Kelautan melaksanakan kegiatan Pembinaan Rehabilitasi Terumbu Karang yang dilaksanakan di Desa Widoro, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan wawasan bagi masyarakat wilayah pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang.

Hadir sebagai Narasumber Ir. Nur Andriyono, MT. selaku Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Ada juga Drs. Edy Yanuriyadin, M.M. selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Dan terakhir Syariful Laeludin, A.Md. dari Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Peserta kegiatan merupakan Pokmaswas dan KUB Desa Widoro. Diketahui, potensi terumbu karang yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pacitan kurang lebih 11.51 Ha.

Diharapkan masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Terumbu karang memiliki banyak fungsi baik ekologi, ekonomi maupun sosial. Diantaranya sebagai habitat

hidup, mencari makan dan berkembang biak bagi biota laut, penahan gelombang dan pemecah arus air laut, dan sebagai objek pariwisata snorkeling.

Adapun cara rehabilitasi terumbu karang dapat dilakukan salah satunya dengan transplantasi terumbu karang buatan. Selain potensi terumbu karang, pada Desa Widoro juga terdapat potensi lobster dan rumput laut. (ADV)

Adik Raffi Ahmad Tak Lolos DPRD Jabar tapi Dilantik, Kok Bisa?

JAKARTA-Kabar mengejutkan datang dari adik dari artis Raffi Ahmad, Nisya Ahmad. Dia tiba-tiba dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) dari fraksi PAN. Padahal, berdasarkan raihan suara dalam Pileg 2024, Nisya dinyatakan tidak lolos.

Mengenai hal ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adi Saputro, menjelaskan Nisya tak ujung-ujug dilantik.

Adi mengatakan Nisya menggantikan caleg terpilih Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, yang sebelumnya mengundurkan diri.

"Jadi bu Thoriqoh itu, saya lupa tanggalnya, tapi bulan Agustus pertengahan ya, itu beliau mengundurkan diri dari caleg terpilih," kata Adi, Selasa (3/9/2024).

Diketahui, Thoriqoh lahir di Bandung 31 Oktober 1975. Wanita berusia 49 tahun ini menamatkan

studi S1 di Universitas Jenderal Achmad Yani. Program magisternya, dia rampungkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Thoriqoh aktif dalam berorganisasi. Ia tergabung sebagai anggota ICMI MUDA Kota Bandung pada 2007 hingga 2010. Selain itu, dia menjabat sebagai Ketua DPW PARRA Indonesia pada tahun 2010 hingga 2019.

Dia merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Bandung. Pada 2009 sampai 2013, ia menjadi bendahara DPD PAN Kabupaten Bandung.

Total suara Nisya di Dapil II Jabar yang meliputi daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat adalah 50.422. Sementara Thoriqoh Fitriyah, mengantongi 58.495 total suara.

Dalam prosedurnya, menurut Adi

itu diturunkan secara otomatis. Tidak ada rekomendasi dari partai.

"Bu Nisya Ahmad ini peroleh suara terbanyak kedua ya, setelah Ibu Thoriqoh. Jadi betul langsung turun otomatis, tidak ada rekomendasi parpol" kata Adi.

Adi juga menyampaikan penggantian caleg dari Thoriqoh ke Nisya Ahmad telah sesuai prosedur yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 6 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, kata Adi, ada 3 kondisi yang memungkinkan caleg terpilih diganti.



Anggota DPRD Jabar 2024-2029, Nisya Ahmad, masuk parlemen menggantikan Thoriqoh Nashrulloh yang mundur, Senin (2/9/2024).ant

"Itu apabila 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri, 3. Mungkin ada putusan pengadilan yang bersangkutan hukum begitu sehingga tidak memenuhi syarat," tuturnya. (tro,rls/dya)

Apresiasi Gerai Perizinan Berusaha KKP

Kadis DKP Jatim: Bantu Pembudidaya Urus Sertifikasi CBIB Secara 'Clear'

SURABAYA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya menggenjot persentase kepemilikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Jawa Timur.

Salah satu langkah yang diambil adalah mendekatkan layanan perizinan ke tengah masyarakat. Gerai perizinan dihadirkan pada acara Asian Pacific Aquaculture (APA) 2024 di Surabaya beberapa waktu lalu. Gerai tersebut salah satunya melayani pengurusan sertifikasi CBIB.

"KKP inisiatif menggelar gerai perizinan berusaha untuk membantu pelaku usaha yang mungkin saja selama ini mengalami kendala," ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu dalam siaran resmi KKP di Jakarta.

Tebe menerangkan, sertifikasi CBIB harus dimiliki pelaku budidaya perikanan sebagai bukti bahwa kegiatan yang dilakukan aman bagi lingkungan. Selain itu, sertifikasi menjamin mutu komoditas yang dihasilkan sebab kegiatan budidaya didukung oleh sanitasi, benih, pakan, hingga obat ikan berkualitas baik.

"Melalui aksi jemput bola ini, kami juga mendorong tingginya investasi, mengarahkan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, serta meminimalisasi ruang gerak perantara atau calo pengurusan perizinan," pungkas Tebe.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Muhammad Isa Anshori menyampaikan Gerai Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh KKP membantu para petambak di Provinsi Jawa Timur.

"Layanan ini membuat pem-



budidaya menjadi clear and clear dalam mengurus sertifikasi CBIB," jelas Isa.

Isa pun berharap Gerai Perizinan Berusaha juga digelar di kabupaten sentra-sentra budidaya perikanan di Jawa Timur, sehingga lebih banyak mengakomodir pembudidaya.

"Di sini, pembudidaya langsung dibimbing dalam mengurus perizinannya. Jika kegiatan ini dilakukan secara optimal dan tepat sasaran nantinya akan memberikan banyak manfaat khususnya bagi para pembudidaya dan stakeholder terkait mengingat saat ini informasi tentang perizinan berusaha sangat dinamis," papar Isa.

Perwakilan pelaku usaha tambak dari CV Vanna Marine Farm Surabaya yang berlokasi di Lamongan, Gusno mengapresiasi langkah KKP melakukan jemput bola dengan menggelar Gerai Perizinan Berusaha pada saat APA 2024. Gerai perizinan dinilainya sangat membantu dalam mengurus sertifikasi CBIB.

"Melalui Gerai perizinan tersebut, kami menjadi paham dan clear dalam mengurus perizinan, yang saat ini informasi tersebut tidak kami dapatkan," tegas Gusno.

Sementara, Helmi dari pelaku usaha tambak, PT Anugerah Tanjung Gumukmas, Jember juga mengatakan pelayanan pada gerai perizinan yang dilakukan oleh tim KKP sangat informatif. Menjelaskan kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan, hingga tahapan dan update proses per-izinan yang saat ini sedang dilakukan.

Sebagai informasi, Gerai Perizinan Berusaha yang dihadirkan KKP pada acara APA 2024 memberikan layanan untuk sembilan kategori. Meliputi Sertifikasi CBIB, layanan konsultasi Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), pelayanan kegiatan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE), Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat dari Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui

BKPM yang diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Pembuatan Sertifikat laik operasi (SLO) oleh Direktorat Teknik dan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Kementerian PUPR dan Pengurusan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. (ADV)



“

Di sini, pembudidaya langsung dibimbing dalam mengurus perizinannya. Jika kegiatan ini dilakukan secara optimal dan tepat sasaran nantinya akan memberikan banyak manfaat khususnya bagi para pembudidaya dan stakeholder terkait mengingat saat ini informasi tentang perizinan berusaha sangat dinamis,

MUHAMMAD ISA ANSHORI
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur

Masih Ada 4.494 Bidang Tanah Pemkot Malang Belum Tersertifikasi

MALANG - Dari total 8.264 bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, hingga saat ini masih ada 4.494 bidang yang belum tersertifikasi. Pemkot Malang menargetkan seluruh proses sertifikasi tanah ini dapat tuntas pada tahun 2025.

Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Eko Fajar Arbandi, mengatakan langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkot untuk memastikan seluruh aset tanah memiliki kepastian hukum, demi mencegah potensi konflik kepemilikan di masa mendatang.

"Targetnya mudah-mudahan bisa selesai di 2025. Harapannya seperti itu. Kan sudah 50 persen lebih, semoga bisa," ujar Eko, Selasa (3/9/2024).

Namun, Eko mengakui terdapat beberapa kendala di lapangan yang berpotensi menyebabkan proses legalitas ini molor hingga 2026. Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi yakni sejumlah aset tanah milik Pemkot yang saat ini masih ditempati oleh perorangan.

"Namun, karena beberapa aset masih ditempati secara perorangan,

kemungkinan proses ini akan tuntas pada tahun 2026," katanya. Terkait hal ini, menurut Eko, perlu dilakukan beberapa tahapan agar status tanah-tanah tersebut sah menjadi milik Pemkot Malang.

Lebih lanjut, selama tahun 2024 ini, Eko menyebutkan, Pemkot Malang telah menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam upaya menyelamatkan aset daerah.

Dijelaskannya, sejauh ini BKAD Kota Malang telah berhasil mengamankan aset senilai Rp 496 miliar melalui penerbitan 76 Sertifikat Hak Pakai (SHP). Yang diantaranya mencakup 201 bidang tanah.

"Aset tersebut tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Termasuk di Kecamatan Sukun yang terdiri dari 12 SHP dengan 35 bidang tanah, kalau untuk total nilainya mencapai Rp 29,5 miliar," imbuh Eko.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan sertifikasi aset tanah milik Pemkot Malang merupakan langkah penting dalam



Salah satu aset tanah milik Pemkot Malang di Kecamatan Kedungkandang. (Santi/Lenteratoday)

menjaga dan menata secara tertib aset daerah, agar tidak terjadi kehilangan aset di masa yang akan datang.

Erik menambahkan, tanah di Kota Malang terbagi menjadi dua kategori yakni tanah yang dimiliki oleh Pemkot Malang dan tanah non-Pemkot. Tanah non-Pemkot, menurutnya dapat dimiliki oleh berbagai instansi serta oleh warga masyarakat.

"Non pemkot itu bisa dimiliki instansi lain atau warga masyarakat.

Jika semua jengkal tanah di Kota Malang ini sudah tersertifikatkan, maka akan disebut sebagai kota lengkap," tambahnya.

Meskipun demikian, senada dengan Eko, Erik juga mengakui proses sertifikasi tidaklah mudah dan ada beberapa kendala yang dihadapi. Terlebih saat ini juga masih banyak berkas sertifikasi yang antri di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diproses. (Santi/Dya)

Jika Paslon Pilbup Malang Tak Lolos Tes Kesehatan, KPU: Bisa Diganti



Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (dok. Istimewa)



Penggantian pasangan calon dapat dilakukan jika dalam hal berhalangan tetap, kemudian dijatuhi pidana berdasar putusan pengadilan, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Ada kode etik yang mengatur agar hasil tersebut tidak dipublikasikan. Itu adalah bagian dari privasi calon,"

MALANG - KPU Kabupaten Malang menegaskan, pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat kesehatan dalam tahapan Pilkada 2024, dapat diganti oleh orang lain. Hal ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 126.

"Hari ini akan disampaikan hasil pemeriksaan kesehatan dari RSSA kepada KPU Kabupaten Malang," ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang,

Marhaendra Pramudya Mahardika, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (3/9/2024).

Pria yang akrab dengan sapaan Dika ini menjelaskan, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan menjadi salah satu penentu kelanjutan pencalonan dua pasangan calon yang telah mendaftarkan diri.

"Penggantian pasangan calon dapat dilakukan jika dalam hal berhalangan tetap, kemudian dijatuhi

pidana berdasar putusan pengadilan, dan dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan," jelasnya.

Namun, ia menegaskan hasil tes pemeriksaan kesehatan bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan untuk umum. "Ada kode etik yang mengatur agar hasil tersebut tidak dipublikasikan. Itu adalah bagian dari privasi calon," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Dika, jika nanti hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menunjukkan adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, maka parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan dapat mengajukan calon pengganti paling lama tiga hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi diterima," ungkapnya.

Di sisi lain, Dika mengungkapkan jika saat ini KPU Kabupaten Malang tengah melakukan penelitian dokumen persyaratan dan akan mengumumkan hasil penelitian administrasi tersebut pada 13 September 2024.

Untuk paslon yang dokumennya

tidak memenuhi syarat administrasi, menurutnya KPU akan memberikan waktu perbaikan pada tanggal 6-8 September 2024. Dika menyatakan, setelah periode tersebut berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki dokumen persyaratan.

"Kalau masa perbaikan persyaratan administrasi itu kan tanggal 6-8 September. 6-8 September juga menjadi itu batas perbaikan persyaratan," tukasnya.

Sebagai informasi, sebanyak dua pasangan calon telah resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Malang. Pasangan pertama yakni Sanusi-Lathifah Shohib yang mendaftar pada hari kedua pendaftaran, Rabu (28/8/2024). Pasangan ini didukung oleh beberapa partai besar, termasuk PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, PPP, PSI, dan Partai Gelora.

Sementara itu, pasangan kedua, Gunawan HS dan Umar Usman, mendaftarkan diri pada hari ketiga, Kamis (29/8/2024). Pasangan ini diusung oleh gabungan partai politik seperti Golkar, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. (Santi/dya)

Bima Rafsajani Rafid Anggota DPRD Jatim Termuda di Usia 22 Tahun

MENJADI seorang anggota dewan, tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Bima Rafsanjani Rafid.

Pemuda yang baru berusia 22 tahun ini resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Sabtu (31/8).

Bima mengaku saat ini dirinya masih tercatat sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Politik Universitas Brawijaya (UB).

Dia mengaku mengenal dinamika politik sejak kecil. Ayahnya, Sumail Abdullah, merupakan anggota DPR RI.

Namun, hal itu bukan alasan utama yang mendorongnya untuk maju.

"Saya terjun ke politik atas dorongan teman-teman organisasi di kampus. Kondisi demokrasi Indonesia yang sedang berkembang, serta bonus demografi yang didominasi oleh pemilih muda, menjadi faktor penting," terangnya.

"Generasi muda sekarang punya kekuatan besar. 60 persen pemilih adalah Gen Z dan milenial. Saya merasa bahwa suara mereka harus diwakili oleh orang yang mengerti dan sefrekuensi," imbuhnya.

Bima yang berangkat dari Partai Gerindra untuk Dapil Jatim 4 (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) ini berhasil meraih 78.656 suara,

"Kemenangan ini bukan hanya karena saya, tapi karena banyaknya dukungan dari anak-anak muda yang ingin perubahan. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur," katanya.

Sebagai anggota DPRD termuda, Bima menyadari bahwa tanggung jawabnya sangat besar.

Salah satu fokus utamanya adalah pemberdayaan pemuda, terutama terkait masalah sulitnya mencari pekerjaan.

"Banyak anak muda yang aspirasinya belum tersampaikan, terutama soal pekerjaan. Mereka butuh dirangkul, didukung, dan diberi

peluang yang lebih luas," tegasnya.

Bima melihat bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan, tetapi seringkali mereka tidak memiliki akses atau kesempatan untuk berkembang.

"Saya ingin memastikan bahwa anak muda di Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso punya akses lebih baik ke lapangan kerja dan program-program pemberdayaan," jelasnya.

Ke depan dia berkomitmen menjaga integritas, prinsip dan janji yang pernah dia ungkapkan.

"Tentu jika saya tidak bisa menepati janji-janji saya waktu kampanye bisa-bisa saya tidak akan di pilih lagi di kemudian hari," tegasnya.

Dikatakan, ilmu yang diperoleh dari kampus menjadi bekal dia saat berkontestasi.

"Sebab di Sosiologi itu mengajarkan bagaimana kita di masyarakat itu bisa berinteraksi sosial, menjalin kedekatan dengan masyarakat sampai bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka," jelasnya.

Termasuk bagaimana caranya bisa menggaet kelompok masyarakat yang berbeda agama, keyakinan, kultur dan budaya.

"Dari situlah ilmu atau rumus-rumus yang saya dapatkan selama berkuliah di Sosiologi UB ini," paparnya.

Salah satu kunci kesuksesan di Pileg adalah mental yang kuat dan investasi sosial.

"Investasi sosial paling penting, supaya kita bisa lebih dikenal dan bisa memberikan banyak sumbangan positif untuk masyarakat, terus masyarakat juga jadi bisa tahu kedepannya kita mau melakukan apa saja untuk kedepannya," kata dia.

Selain modal uang, investasi sosial yang ia tanam akhirnya berbuah jadi

kepercayaan. Karena itulah, Bima ingin agar civitas akademika juga tak segan mengisi pos pos politik.

Sebab menurutnya dengan bekal ilmu pengetahuan di ranah akademis golongan intelektual bisa menjadi pemimpin atau politikus, sehingga kedepannya demokrasi di Indonesia bisa berkembang ke arah yang lebih baik (berbagai sumber)



“
Kemenangan ini bukan hanya karena saya, tapi karena banyaknya dukungan dari anak-anak muda yang ingin perubahan. Saya merasa sangat beruntung dan bersyukur,”
Bima Rafsajani Rafid





6 MANFAAT KESEHATAN

BUAH GANDARIA YANG JARANG DIKETAHUI

GANDARIA yang bernama latin *Bouea macrophylla* Griffith adalah salah satu jenis tanaman buah tropis di Indonesia yang menyebar dari kawasan Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Ambon. Gandaria termasuk famili Anacardiaceae atau suku mangga-mangga, dan masih satu famili dengan mangga dan jambu mete.

Buah Gandaria rasanya juga asam manis menyegarkan, sehingga cocok kamu jadikan campuran dalam es buah. Kamu juga bisa mengonsumsinya secara langsung, atau menambahkannya ke dalam salad atau menjadi jus atau acar. Tidak hanya rasanya enak, buah eksotis ini juga bisa memberikan banyak manfaat kesehatan.

Kandungan Nutrisi dalam Buah Gandaria

Buah Gandaria (*Bouea macrophylla*) adalah buah tropis yang mengandung berbagai nutrisi penting. Berikut adalah beberapa kandungan nutrisi yang ditemukan dalam buah Gandaria:

Vitamin C:

Gandaria merupakan sumber vitamin C yang baik, yang berperan penting sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga mendukung sistem kekebalan tubuh.

Serat Pangan:

Buah ini mengandung serat yang dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, sehingga baik untuk kesehatan saluran pencernaan.

Mineral:

Buah Gandaria mengandung mineral seperti kalsium dan zat besi. Kalsium penting untuk kesehatan tulang dan gigi, sementara zat besi berperan dalam produksi sel darah merah.

Karbohidrat dan Protein:

Seperti buah lainnya, Gandaria mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Namun, kandungan proteinnya relatif rendah. Air: Gandaria juga mengandung banyak air, yang membantu menjaga hidrasi tubuh, terutama di iklim tropis di mana buah ini biasanya tumbuh.

Manfaat Buah Gandaria untuk Kesehatan

Manfaat kesehatan buah Gandaria tidak terlepas dari nutrisi yang terkandung di dalamnya.

Buah ini kaya akan beta karoten, vitamin C, kalsium, kalium, fosfor, dan makanan sehat tersebut bisa memberikan sejumlah manfaat berikut:

1. Menjaga kesehatan kulit

Kandungan vitamin C-nya yang tinggi bisa membantu pembentukan jaringan kolagen, sehingga bisa melembapkan, menutrisi dan membuat kulit wajah terasa lebih kenyal. Selain itu, kolagen juga berperan sebagai agen anti aging dengan cara mengurangi kerutan halus pada wajah.

2. Mempercepat proses penyembuhan

Berkat kandungan vitamin C, manfaat buah Gandaria juga berpotensi mempercepat proses pemulihan saat sakit. Berdasarkan jurnal dari University of Helsinki, meningkatkan asupan nutrisi tersebut sebanyak 6-8 gram per hari bisa mencegah dan mengurangi infeksi akibat bakteri dan virus berdasarkan uji coba pada sejumlah hewan.

Jadi, mengonsumsi buah tropis ini bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin C harian yang penting untuk sistem kekebalan tubuh.

Orang dewasa yang berusia 19-29 tahun umumnya perlu memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut per hari sebanyak 90 miligram untuk pria dan 75 miligram untuk wanita. Sedangkan dalam 100 gram buah gandaria bisa mengandung 111 miligram vitamin C.

3. Memperlancar sistem pencernaan

Kombinasi kandungan air dan serat yang tinggi pada buah berwarna hijau ini bisa memperlancar dan menjaga sistem pencernaan kamu. Mengonsumsi buah ini bisa membantu mengatasi gangguan pencernaan, seperti sembelit.

Kandungan air dan serat juga membantu proses penyerapan nutrisi dalam tubuh menjadi lebih optimal. Selain itu, The American Institute for Cancer Research juga menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan berserat tinggi, seperti biji-bijian, sayuran, atau buah-buahan, sebanyak 30 gram per hari bisa menurunkan risiko kanker kolorektal yang berhubungan dengan saluran pencernaan.

4. Meningkatkan fungsi jantung

dan peredaran darah. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi serat juga penting untuk mencegah penyakit jantung.

Asupan 26 gram serat per hari bisa menurunkan risiko penyakit jantung sekitar 40 persen. Nutrisi tersebut juga bisa mencegah kadar kolesterol tinggi, terutama low density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat.

Sebagai sumber makanan berserat tinggi, manfaat buah gandaria juga berpotensi menurunkan tekanan darah dan mencegah peradangan. Kandungan airnya yang tinggi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh.

5. Baik untuk kesehatan otak

Berkat kandungan beta karotennya, buah eksotis ini juga sangat otak karena formula pro-vitamin A bisa memastikan regenerasi sel otak terjadi secara optimal. Selain itu, kandungan airnya yang tinggi juga bisa membantu organ penting tersebut berfungsi dengan lancar.

6. Mencegah diabetes

Kandungan serat yang tinggi juga membuat buah ini baik untuk dikonsumsi pengidap diabetes, karena efektif untuk memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Buah ini juga mengandung karbohidrat yang cukup banyak, sehingga bisa menjadi sumber energi bagi tubuh pengidap. Itulah mengapa buah Gandaria bisa menjadi camilan yang enak dan sehat bagi pengidap penyakit ini. Itulah manfaat buah Gandaria (nei, ist/dya)

WHATSAPP SIAPKAN FITUR "FILTER CHAT" DAPAT DIKUSTOMISASI

WHATSAPP tengah menyiapkan fitur "filter chat" yang dapat dikustomisasi oleh penggunanya menjadi pembaruan menarik yang membuat pencarian obrolan bisa lebih optimal dan efisien apabila fitur ini dirilis untuk umum.

Hal ini ditemukan dalam pembaruan WhatsApp beta untuk Android versi 2.24.18.16 oleh WABetaInfo.

Seharusnya fitur ini dirilis dalam pembaruan mendatang, memungkinkan pengguna fitur ini membuat daftar isi khusus yang berisikan obrolan dengan sesama pengguna maupun grup.

Setelah daftar isi selesai dibuat nantinya WhatsApp akan secara otomatis menghadirkan daftar tersebut sebagai bagian dari filter.

Dengan demikian, pengguna bisa lebih mudah untuk menemukan dan mengakses percakapan tertentu dengan cepat.

Filter akan memiliki nama yang sama dengan daftar tersebut, yang memastikan bahwa pengguna dapat segera mengenali dan memilih filter yang sesuai untuk hanya melihat obrolan yang terkait dengan daftar tersebut.

Pengguna akan dapat memilih filter khusus yang dibuat oleh daftar untuk hanya melihat obrolan yang relevan, sehingga mereka dapat fokus pada diskusi penting tanpa gangguan.

Kombinasi daftar dan filter khusus akan meningkatkan pengaturan dan kenyamanan, karena pengguna akan dapat mengakses obrolan yang paling relevan dengan cepat hanya dengan

beberapa ketukan.

Selain untuk penggunaan pribadi, fitur ini akan sangat bermanfaat bagi bisnis yang menggunakan aplikasi WhatsApp Business.

Bisnis akan dapat melacak prospek baru, transaksi yang sedang berlangsung, dan pertanyaan pelanggan secara efisien dengan mengkategorikan pelanggan dan percakapan ke dalam daftar tertentu.

Filter khusus akan memungkinkan

bisnis untuk memantau pembayaran, menindaklanjuti pesanan, dan memberikan dukungan pelanggan yang tepat waktu, semuanya dari dalam aplikasi.

Fitur untuk memfilter obrolan melalui daftar khusus sedang dalam pengembangan dan akan tersedia dalam pembaruan mendatang.

Menjadi mudah

Pengguna sudah bisa

menggunakan fitur "Filter Chat" ini dengan mengupdate aplikasi WhatsApp versi terbaru.

Fitur baru ini terdiri dari beberapa filter chat agar aplikasi dapat mengakses jenis pesan tertentu dengan mudah yang terdiri dari Semua, Belum Dibaca, dan Grup.

Filter "Semua" dipilih secara default dan menampilkan versi chat yang tidak difilter. Filter "Belum Dibaca" berguna dalam melihat pesan yang mungkin belum Anda lihat.

Ini juga membantu pengguna mengosongkan chat dan menghilangkan notifikasi obrolan yang belum dibaca yang kadang mengganggu.

Meta mengatakan bahwa filter "Grup" adalah salah satu fitur yang paling dicari untuk menelusuri semua obrolan grup dengan cepat.

Filter ini juga akan menampilkan percakapan dalam subgrup yang merupakan bagian dari Komunitas, sebuah fitur grup diskusi WhatsApp.

Rangkaian filter ini mungkin hanya permulaan. Seperti yang dilaporkan oleh WABetaInfo, WhatsApp telah mengerjakan filter lain seperti "Kontak" untuk menyaring pesan dari orang dan bisnis yang tidak dikenal, "Favorit" untuk menandai kontak yang sering digunakan dan bahkan filter obrolan khusus di berbagai versi beta aplikasi.

WhatsApp mengatakan opsi filter akan diluncurkan kepada pengguna mulai Rabu pekan ini dan akan tersedia untuk semua pengguna secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan (Lenteratoday)



Galeri Nasional Pamerkan Karya Lini Natalini Whidiasi

LINI Natalini Widhiyasi merupakan perupa perempuan kelahiran Surabaya dari pasangan pelukis Anastasia Moentiana (1936-2007) dan Tedja Soeminar (1936-2016). Seniman kelahiran 25 Desember 1964 ini pada dekade 70-an dikenal sebagai pelukis cilik ajaib yang menarik perhatian para maestro.

I Gusti Nyoman Lempad (1862-1978) dan Affandi (1907-1990) pernah mengatakan bahwa Lini adalah "sang guru" dan "pelukis cilik ajaib". Hasil guratan tangan dan jemarinya juga dianggap sebagai lukisan bergenre kontemporer yang menarik perhatian komponis Slamet Abdul Sjukur (1935-2015).

Lini dikenal sebagai sosok produktif, tak pernah berhenti bereksplorasi termasuk dalam pemilihan media dan bentuk.

Sejak 1994 hingga kini artwork 3 dimensinya banyak menghiasi ruang publik, salah satunya bertempat di Balai Pemuda Surabaya yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamadya Surabaya.

Pameran seni belakangan ini semakin ramai digelar untuk mengenalkan karya seniman pada publik.

Selain menjadi bentuk apresiasi terhadap para perupa, berkunjung ke pameran seni juga bisa menjadi kegiatan seru untuk menikmati waktu luang atau berjalan-jalan pada akhir

pekan.

Pameran tunggal karya seni rupa Lini Natalini Widhiyasi yang bertajuk "Infinity Yin Yang" akan digelar di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat.

Acara ini dijadwalkan berlangsung mulai 4 September 2024 hingga 3 Oktober 2024. Pameran karya pelukis cilik "ajaib" era 70-an asal Surabaya itu akan dibuka pada Selasa (3/9/2024) pukul 19.00 WIB di Amphitheatre Gedung A Galeri Nasional Indonesia.

Menurut siaran pers dari Galeri Nasional Indonesia pada Selasa (3/9/2024), Citra Smara Dewi mengurasi karya-karya Lini yang ditampilkan dalam pameran tersebut, termasuk di antaranya karya seni instalasi.

Citra mengatakan bahwa karya-karya yang ditampilkan dalam pameran ini merupakan karya terbaru Lini yang visioner, yang menunjukkan kekuatan eksplorasi sekaligus eksploitasi material, medium, dan teknik.

Lini tidak lagi berkuat pada ruang dua dimensi yang dia tekuni sejak kanak-kanak, tetapi juga mengeksplorasi karya-karya tiga dimensi.

"Hasrat berkesenian saya kurang terpenuhi melalui karya seni lukis dua dimensi, sehingga saya mencoba dan mencari sensibilitas artistik lain, sampai akhirnya saya menemukan

aluminium yang dapat memenuhi imajinasi dan rupa bentuk yang saya sukai dalam mengaktualisasikan karya," kata Lini.

Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional Indonesia Jarot Mahendra menyampaikan bahwa pameran tunggal Lini di Galeri Nasional Indonesia menunjukkan perkembangan kekaryaannya yang signifikan.

"Semoga karya-karya Ibu Lini dapat menginspirasi generasi masa kini dan mendatang," katanya.

Pameran tunggal Lini Natalini Widhiyasi di Galeri Nasional Indonesia dibuka untuk umum dari 4 September hingga 3 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 sampai 19.00 WIB.

Warga yang ingin menyaksikan pameran dapat datang langsung dan melakukan registrasi di tempat pelaksanaan pameran.

Pengunjung berusia 3 sampai 12 tahun dikenai tarif masuk Rp10.000 per orang, pengunjung dewasa tarifnya Rp20.000 per orang, dan pengunjung warga negara asing dikenai tarif Rp50.000 per orang.

Anak usia kurang dari tiga tahun dan orang dewasa umur 60 tahun lebih tidak dikenai tarif masuk. Selain menikmati pameran karya seni rupa, pengunjung bisa mengikuti kegiatan Artist Talk yang dijadwalkan berlangsung 15 September 2024 pukul 15.00 WIB di Galeri Nasional

Indonesia.

Ketua Tim Museum dan Galeri Indonesian Heritage Agency Zamrud Setya Negara menyampaikan bahwa penyelenggaraan pameran seni di Galeri Nasional Indonesia sejalan dengan upaya Indonesian Heritage Agency dalam mewujudkan konsep re-imajinasi museum.

"Khususnya pilar re-programming dengan memberikan ruang untuk para pelaku seni, budaya, dan sejarah untuk mengadakan kegiatan pameran ataupun di unit museum kami, salah satunya di Galeri Nasional Indonesia," kata dia.

Pameran "Infinity Yin Yang" merupakan kesempatan langka untuk melihat evolusi karya Lini Natalini Widhiyasi dan mengalami langsung bagaimana seni dapat menghubungkan berbagai dimensi dan perspektif.

Pameran seni Infinity Yin Yang jadi momen pembuktian sebagai perupa perempuan.

Setelah lebih dari 50 tahun berkarya dengan diwarnai masa vakum untuk fokus pada keluarganya, Lini kembali dalam performa baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya.

Lini merancang pameran ini sebagai sustainable/sequel project yang direncanakan akan digelar di berbagai tempat. (nei,ist/dya)



Pemindahan ASN ... (dari Hal 1)

RENCANA awal, mulai September tahun ini hingga 2029 ASN berpindah ke IKN secara bertahap. Di prioritas pertama, ada sebanyak 32.937 pegawai, terdiri dari pemindahan prioritas 1 dengan 179 unit pejabat eselon 1 di 38 kementerian/ lembaga dengan jumlah ASN yang pindah sebanyak 11.016 pegawai.

Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 6.884 pegawai.

Sedangkan prioritas pemindahan ke-3 melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian/ lembaga, dengan jumlah ASN yang pindah ke ke IKN sebanyak 14.237 orang.

Namun kini semua berubah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan alasan Presiden Jokowi tak terburu-buru memutuskan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan September ini.

Dari pembicaraannya dengan Kepala Negara, kata Azwar, pemindahan aparat sipil negara ke IKN Kalimantan Timur masih menunggu pembangunan infrastruktur digital rampung.

"Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (3/9/2024).

Meskipun rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap, kata Azwar, Presiden memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya.

Adapun pemindahan ASN ke IKN tersebut mundur dari jadwal semula pada September 2024. Hal ini, kata Azwar, juga tak lepas dari keputusan pemerintah menunggu hunian dan perkantoran selesai.

Sebelumnya, kata Azwar, Presiden Jokowi juga menyebutkan masih menunggu rampungnya pembangunan Bandara di IKN dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN.

"Kita tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar.

Azwar mengatakan pihaknya juga menunggu arahan lebih lanjut dari Jokowi soal perpindahan ASN. Meski begitu, ia sudah menyiapkan skema perpindahan tersebut.

Namun demikian, ia menegaskan untuk target ASN yang pindah lebih awal masih belum berubah, yakni 1.700 ASN. Pada Desember mendatang ditargetkan sudah ada 47 tower hunian ASN yang sudah rampung.

"Sekali lagi, September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden, ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan. Tapi KemenPAN sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah," ucapnya.

"Kita lihat bisa saja Oktober atau September masih nunggu Otorita IKN terkait persiapannya," lanjut Azwar Anas.

Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya juga memastikan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September jika infrastruktur yang mendukung belum siap.

"Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," ucap Presiden Jokowi pada Agustus lalu.

Salah satu syarat kepindahan ASN ke IKN tersebut, menurut Jokowi, disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) pegawai negeri itu untuk dihuni.

Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penundaan pemindahan ASN ke IKN mengindikasikan adanya masalah yang lebih kompleks dari sekadar kesiapan ekosistem.

"Penundaan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, koordinasi, serta pengelolaan proyek IKN secara keseluruhan," ujar Achmad.

Selain persoalan kesiapan ekosistem, menurut Achmad, penundaan pemindahan ASN ke IKN juga terjadi karena adanya resistensi dari ASN. Kekhawatiran ASN akan kehidupan di IKN, terutama soal kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung, ditengarai menjadi alasan utama di balik penolakan pemindahan ini. ASN, menurut Achmad, tidak merasa diuntungkan jika pindah ke IKN.

"Tanpa adanya jaminan yang jelas dari pemerintah mengenai kondisi di IKN, resistensi ini kemungkinan akan terus meningkat dan semakin memperlambat proses pemindahan," kata dia.

Terlepas dari persoalan-persoalan tersebut, Achmad berpendapat bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hal mendesak yang harus dieksekusi tahun ini. "ASN seharusnya bekerja dekat dengan rakyat, bukan di menara gading, agar mereka dapat memahami dan merespons secara riil persoalan teknis dan birokratis yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemerintah," kata dia.

Terlebih, ia menambahkan, memindahkan ASN ke tempat baru bukan perkara sederhana. Ada perkara logistik yang perlu disiapkan. Sementara, menurut Achmad, pemerintah belum cukup siap dengan hal ini.

"Masalah transportasi, pemindahan barang, serta penyediaan fasilitas dasar di tempat tujuan

membutuhkan koordinasi yang sangat baik, yang sayangnya, belum tercapai dalam proses ini. Akibatnya, proses pemindahan terus tertunda dan menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut," kata dia.

PUPR Tunggu Prabowo soal Anggaran

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 hanya sebesar Rp4 triliun. Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, memberi sinyal alokasi anggaran itu masih dapat bertambah seiring dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan bakal melanjutkan proyek IKN.

"IKN hanya Rp4 triliun [alokasi anggaran dari PUPR] di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih [Prabowo]," kata Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip Selasa (3/9/2024).

Adapun, anggaran Rp4 triliun itu akan difokuskan untuk melakukan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Penurunan alokasi anggaran yang diguyur Kementerian PUPR ke IKN itu seiring dengan menyusutnya pagu indikatif Kementerian PUPR 2025 sebesar Rp75,6 triliun.

"Ini memang lebih rendah dari pagu yang berjalan 2024, karena ini adalah ruang fiskal yang diberikan untuk pemerintah baru. Jadi, kita tak mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sudah berjalan," ujarnya.

Endra menegaskan, hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh program yang sudah berjalan tetap berkesinambungan dengan program yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dari total pagu Rp75 triliun, Endra mengaku Kementerian PUPR telah melakukan pemetaan sejumlah proyek-proyek prioritas yang akan digarap. Diantaranya untuk meningkatkan infrastruktur ketahanan pangan, realisasi infrastruktur ketahanan air, serta memantapkan sektor konektivitas.

"[Konektivitas Jalan Tol] itu kan baru sampai Malang. Kita inginkan sampai Banyuwangi, lalu di beberapa wilayah kita terus lanjutkan juga misalkan Trans Kalimantan, jalan Perbatasan Kalimantan kita lanjutnya," imbuhnya.

Kemudian, alokasi anggaran itu juga digunakan untuk menyempurnakan jaringan Jalan Tol Trans Jawa untuk melengkapi konektivitas di wilayah Demak, Pati, Rembang hingga Gresik. "Terakhir, infrastruktur berbasis masyarakat saya kira juga cukup besar program infrastruktur berbasis masyarakat sebagai bantalan ekonomi menambah income, masyarakat desa dan miskin perkotaan. Kemudian, untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian," pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak Rp11,2 triliun anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah direalisasikan sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.

Menkeu Sri Mulyani memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.

"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dia menjelaskan, alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungannya, realisasinya mencapai Rp23 triliun. Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp42,5 triliun. Meski sudah lebih dari pertengahan tahun realisasinya baru Rp11,2 triliun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi akan melonjak pada akhir-akhir tahun anggaran 2024. (tro,ant,rla, ist,kum/dya)

FASILITAS BIAYA PINDAH KE IKN

Lanjutan dari hal 11...

Orang yang Ditanggung

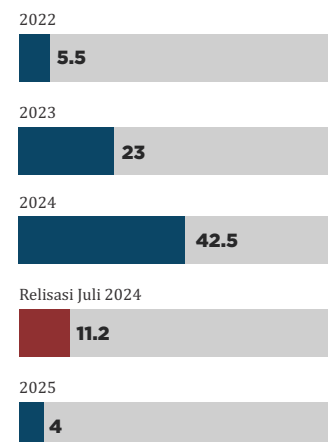
-  1 orang ASN
-  1 pasangan ASN
-  2 anak
-  1 Asisten Rumah Tangga

Komponen yang Dibayar

-  Uang harian selama proses pemindaan
-  Biaya Tunggu / Transit di Penginapan
-  Biaya Pindahan Barang
-  Biaya Transportasi

Anggaran IKN Menurun

di 2025



Terkuak 1.000 Dugaan Perundungan PPDS

Laporan dari RSCM, Unair, USU, Unsri hingga Undip

JAKARTA-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerima 1.000 lebih laporan perundungan (bullying). Dari hasil penelusuran, terdapat 300 kasus yang diduga benar terjadi.

"Ada sekitar 1.000 lebih perundungan yang kita klarifikasi ternyata sebagian besar bukan perundungan, yang perundungan itu sekitar 30 persen yang memang benar-benar perundungan," kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, di Istana Kepresidenan, Selasa (3/8/2024).

Laporan tersebut bukan hanya terkait kasus bullying PPDS Undip-RS Kariadi yang telah disorot lama. "Ya kejadian di Undip, semuanya juga kita investigasi kok, di RSCM diinvestigasi, di Undip diinvestigasi, di Unair diinvestigasi, di USU diinvestigasi, di Unsri juga diinvestigasi," ujar Dante.

Dante tidak merinci 300 peristiwa bullying itu terjadi di kampus atau RS mana saja.

Dante menyebut, perlu bukti solid untuk menentukan kesimpulan dari setiap kali perundungan.

Terkait dengan kasus bunuh diri dr Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Undip di RS Kariadi, Dante masih menunggu hasil investigasi resmi oleh polisi.

"Nanti kita tunggu kepolisian untuk melakukan investigasi resmi ya," ujarnya. Kemenkes sendiri telah menyerahkan hasil investigasi kasus Aulia kepada polisi untuk ditindaklanjuti.

Bahkan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus perundungan di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang sudah keterlalu.

Budi menyebut selain menyerang fisik dan mental korban, para pelaku menurutnya juga melakukan pelecehan seksual.

Hal itu Budi sampaikan saat menanggapi kasus perundungan yang dialami mahasiswi PPDS Undip, dokter Aulia Risma Lestari, yang meninggal karena bunuh diri.

"Perundungan ini sudah keterlalu dan itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harrasment juga," kata Budi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang berlokasi di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Bali, Senin (2/9/2024).

Budi juga mengungkap beberapa korban dimintai uang hingga puluhan juta. Hasil investigasi Kemenkes soal kematian dokter Aulia misalnya,



Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi solidaritas untuk Dokter Aulia di Lapangan Widya Puraya UNDIP, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024) malam. (ANTARA)

ditemukan bahwa ada dugaan pemerasan senilai Rp20-40 juta per bulan.

Budi mengatakan bahwa praktik-praktik perundungan itu sudah terjadi puluhan tahun di Undip dan tidak bisa diselesaikan secara tuntas.

"Menurut saya ini sudah keterlalu, lah, dan sudah saatnya praktik-praktik seperti ini tidak ada lagi di dunia pendidikan apalagi di dokter spesialis kita," kata dia.

Budi pun menolak anggapan bahwa perundungan bisa menghasilkan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang tangguh. Ia mendorong agar praktik bullying itu segera dihilangkan.

"Kan [perundungan] selalu dibilang biar tangguh. Iya, TNI dan Polri juga kurang tangguh apa ya? Pilot juga fisik harus tangguh dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan," ujar Budi.

DPR: Ini Kasus Kriminal

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menilai dugaan perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) sudah memasuki kategori pidana.

"Kasus ini harus menjadi perhatian khusus karena ini bentuk pemerasan, sudah kriminal dan sangat meresahkan," ujar Arzeti dalam keterangannya.

Arzeti menegaskan perlunya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, karena masalah perundungan yang terjadi tidak hanya menasar mental, tetapi juga melibatkan tindak pidana pemerasan. "Ini sangat mengkhawatirkan karena perundungan bukan lagi soal fisik dan mental. Tapi, pemerasan juga," ucapnya.

Arzeti mendorong perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem PPDS di Indonesia. Jika praktik

pemalakan terbukti, hal ini akan menjadi penghambat dalam pendidikan dokter spesialis karena adanya beban biaya tambahan di luar pembayaran program.

"Permintaan uang yang tidak wajar menunjukan adanya ketidakadilan dalam akses pendidikan," sebut Arzeti. "Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan finansial yang sama, sehingga praktik seperti ini dapat menghambat mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan studi," tuturnya.

Sebelumnya, Dekan FK Undip, Yan Wisnu Prajoko, meminta Kemenkes langsung menunjuk siapa pelaku pemalakan.

"Siapa yang memalak, korbannya siapa, dan uang itu ke mana, itu diungkap saja," kata Yan Wisnu saat ditemui di FK Undip, Tembalang, Semarang, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, pemalakan itu merupakan pelanggaran berat sehingga pihaknya siap memberi sanksi berat jika ada orang yang terbukti melakukan pemalakan dalam PPDS.

"Justru itu yang juga saya sampaikan tadi kita membuka investigasi seluas-luasnya dan diungkap saja, kami pun komitmen bila ada pelaku disanksi seberat-beratnya, Tapi kan kita tahu kalau dipalak itu ada pelaku yang memalak, ada korban yang dipalak, dan uang itu masuk ke kantong yang memalak jadi di sini dibuka saja," jelasnya.

"Pasti sanksi berat, itu pelanggaran etik dan akademik yang berat, silakan dibuka saja," tambahnya.

Sementara Rektor Undip, Suharnomo, menegaskan tidak akan menutupi jika ada bullying atau perundungan dan pemalakan oleh senior yang diduga membuat dr. ARL mengakhiri hidupnya. Pihaknya juga akan kooperatif membantu polisi

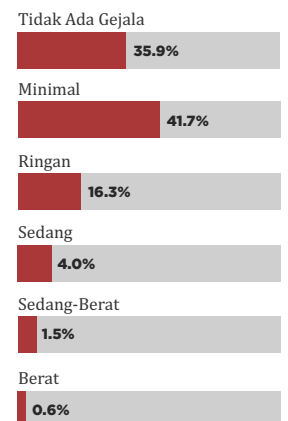
mengungkap kasus tersebut.

"Untuk apa kami menutupi-nutupi, Undip itu badan hukum milik negara. Ini milik kita bersama, jadi buat apa kita menutupi sesuatu. Ini era digital di mana semua orang bisa berekspresi di ruang digital. Yang kita harapkan dialektika di ruang publik yang produktif, yang edukatif, bermanfaat," kata Suharnomo dalam keterangannya.

Suharnomo mengatakan, dirinya menyerahkan proses penyelidikan kasus dugaan perundungan dan pemalakan itu kepada aparat berwenang. Dia juga berjanji akan transparan terkait kasus tersebut. (sum,wid,rls,ant/dya)

Hasil Skrining Kemenkes soal Gejala Depresi PPDS (periode 21-24 Maret 2024)

Tingkat Gejala Depresi yang dialami



Waktu merasa ingin mengakhiri hidup atau melukai diri sendiri dengan cara apapun

